

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan sampai dewasa ini keadaan Negara yang kurang stabil karena banyaknya kerisuhan baik dunia politik dan yang lainnya. Pembangunan ini meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata harus terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli Masyarakat. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong Masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, dan Dana Perimbangan.

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur

umum perpajakan dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai subsistem Pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Masyarakat sebagai Daerah Otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Kediri juga menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang paling diandalkan. Sektor Pajak Daerah tersebut meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C serta Retribusi Daerah yang terdiri: Retribusi Jasa Umum antara lain Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Persampahan, Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya. PAD sebuah tolak ukur untuk mencapai kemandirian sebuah daerah, karena sebagai operasional dalam menjalankan roda

penerimaan dan pengeluaran dalam sebuah daerah. Adapun data PAD untuk Kabupaten se Jawa Timur berikut data keuangan 2011

Tabel 1.1
Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seluruh Jawa Timur

2011
(Rp 000 000)

No.	Kabupaten/Kota	2011	
		Rencana	Target
(1)	(2)	(3)	(3)
1.	Pacitan	24 576	27 824
2.	Ponorogo	5 985	6 759
3.	Trenggalek	31 713	32 346
4.	Tulungagung	73 136	86 934
5.	Blitar	42 552	44 045
6.	Kediri	37 986	51 175
7.	Lumajang	42 821	44 840
8.	Jember	100 903	105 981
9.	Banyuwangi	43 909	49 208
10.	Bondowoso	6 463	9 092
11.	Situbondo	30 541	36 470
12.	Probolinggo	11 859	15 609
13.	Pasuruan	13 504	14 212
14.	Sidoarjo	128 511	135 373
15.	Mojokerto	41 070	58 395
16.	Jombang	72 011	75 958
17.	Nganjuk	59 186	62 960
18.	Madiun	29 797	33 080
19.	Ngawi	27 418	38 743
20.	Lamongan	54 509	48 643
21.	Gresik	86 436	93 167
22.	Bangkalan	18 323	32 822
23.	Sampang	8 202	7 708
24.	Sumenep	10 729	15 750

Sumber :Badan Pusat Statistika, 2011

Dari paparan data PAD diatas Kabupaten Kediri termasuk daerah dengan target dan realisasi yang besar ini sebanding dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri, jika tidak diimbangi dengan pelaporan yang baik dan benar maka angka yang sedemikian besar akan sulit tercapai.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
(Rp 000)

Uraian Pendapatan	Target	Realisasi	
		S/D Bulan Ini	%
Pajak Hotel	226 000	258 458	114
Pajak Restoran	950 170	1 631 235	171
Pajak Hiburan	120 100	173 119	144
Pajak Reklame	1 095 695	1 100 022	100
Pajak Penerangan Jalan	19 753 866	25 242 564	127
Pajak Pengambilan galian C	200 000	201 349	100
Retribusi Jasa Umum	12 115 275	13 537 996	111
Retribusi Jasa Usaha	3 323 782	4 764 743	143
Retribusi Perizinan	418 900	748 730	178
Retribusi Pasar	2 000 000	2 163 370	108

Sumber: Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Kab. Kediri Bulan Desember 2012

Dari paparan data diatas elemen sektor yang mendukung PAD menjadi berbagai sub bagian diantaranya pajak, hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak pengambilan galian c, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi jasa pasar, dan yang terakhir yang masuk dalam retribusi jasa umum retribusi pasar, retribusi pasar dilihat dari target dan pencapaian sangat potensial karena dengan berbagai aspek yang mendukung sehingga dari target dan realisasi tercapai untuk tahun 2012 bulan desember, untuk perkembangan data retribusi pelayanan pasar sebagai berikut per desember tahun 2009 sampai 2012 :

Tabel 1.3
Rekapitulasi Laporan Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Kediri
Bulan Desember 2009smpai 2012

Tahun	Target	Realisasi	Selisih
2009	1.758.024.888	1.939.624.400	181.599.512
2010	1.789.724.888	1.935.216.100	145.491.212
2011	1.793.324.888	1.954.111.250	160.786.362
2012	2.000.000.000	2.163.370.351	163.370.351

Sumber: Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Kediri Bulan Desember

2009 sampai 2012

Kontribusi retribusi pasar terhadap penerimaan PAD diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan PAD menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Kabupaten Kediri sebagai salah satu daerah otonom di Propinsi Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Kediri lebih maju. Peningkatan penerimaan retribusi pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya makin besar. Namun demikian perlu pengkajian lebih dalam, faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi retribusi pasar agar mampu melampaui nilai target retribusinya. (Arjangga Wisnu Raga :2011)

Perkembangan hasil penerimaan retribusi ternyata tidak selalu sama dengan rencana penerimaan (target) retribusi pasar dari tahun ke tahun karena dengan dipengaruhi beberapa faktor. Menurut R. Soedargo dalam Arizaldy (2009) menyebutkan faktor yang menentukan keberhasilan penerimaan retribusi termasuk retribusi pasar adalah subyek (jumlah pedagang) yang ada dipasar tersebut, obyek (luas kios, los, dan dasaran terbuka), tarif retribusi serta kinerja pemungutan (efisiensi dan efektivitas pemungutan) retribusi pasar. Setiap tahunnya dilakukan sebuah kerjasama antara Pemda Kabupaten Kediri dan Dinas Pasar Kabupaten Kediri selalu membuat target penerimaan, dimana target tersebut merupakan suatu tolak ukursasaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yakni mengukur sejauh mana realisasi penerimaan dapat tercapai terutama retribusi pelayanan pasar.

Pedagang mempunyai pengaruh besar terhadap efektivitas penerimaan. Sesuai dengan sifatnya, maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan yang telah pemerintah daerah. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah dalam hal ini pelayanan pasar, maka penerimaan daerah dari retribusi juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah tersebut (Arizaldy 2009), sehingga pedagang diduga mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan retribusi pasar. Penetapan tarif mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan. Besarnya tarif retribusi daerah yang dikenakan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah.

Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22)

Pada organisasi Pemda, laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 9 Tahun 2002 Pasal 81 ayat (1). Peraturan tersebut diperbaharui dengan PP Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006. Karena akuntansi pemerintahan/keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi maka dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di Pemda. Sebelum era reformasi, keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut akuntansi, pengertian demikian tidaklah tepat. Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Terdapat berbagai macam sistem pencatatan yang digunakan yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Pembukuan hanya menggunakan pencatatan sistem pencatatan *single entry*, sedangkan akuntansi dapat menggunakan ketiga

sistem pencatatan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi. (Naie : 2013)

Dalam upaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya pada sektor Retribusi Pasar, perlu diterapkannya suatu pencatatan yang mendukung dan sesuai dengan kaedah yang berlaku diatur dalam peraturanyang baik dan tepat supaya segala bentukkecurangan dan penyelewengan dalam pemungutannya atau kepengurusannya dapat dicegah atau diantisipasi seminimal mungkin.

Didalam hal ini penyusunan pos retribusi daerah terutama retribusi pelayanan pasar sudahkah sesuai dengan SAP dan Permendagri No 13 Tahun 2006 yang berlaku dengan kaedah-kaedah yang ada sehingga potensi retribusi penerimaan pelayanan pasar yang sangat besar bisa di optimalkan secara berkelanjutan karena didukung dengan pelaporan yang baik maka hasil pencapaian dari target akan lebih mudah dicapai untuk kedepanya di daerah Kabupaten Kediri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat (2008) menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan retribusi pasar perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar. Didalam penelitiannya, Sudrajat menjelaskan bahwa retribusi pasar dipengaruhi oleh faktor jumlah pedagang, luas los dan kios, dan jumlah petugas pemungut retribusi. Semakin banyak jumlah pedagang, luas kios, los, dasaran terbuka dan jumlah petugas pemungut retribusi maka penerimaan retribusi pasar yang akan didapat akan semakin besar penerimaannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nofri Melsi (2006) yang berjudul Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, menyimpulkan bahwa penerapan SAKD pada pmda kabupaten pariaman berjalan cukup baik

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bagus Santoso (1995) menyimpulkan bahwa Pasar Sleman mempunyai persentase perbandingan realisasi dan potensi yang tertinggi dikarenakan Kabupaten Sleman sebagai model percontohan otonomi daerah dan Pasar Sambilegi mempunyai persentase yang terendah.

Dari uraian diatas mengenai penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam Pendapatan Asli Daerah dan melakukan pelaporan retribusi bahwasnya retribusi pasar dikatakan fluktuatif naik turun antara pasar yang ada di Sleman dan Sambilegi sehingga ada dampak perbedaan untuk penerimaan retribusi pasar karena juga dipengaruhi banyak factor yang ada dipasar tersebut diantara para pedagang dan jumlah pembeli yang datang.

Sehingga penulis ingin mengangkat penelitian yang berlokasi di wilayah Kabupaten Kediri mengenai retribusi pasar karena penelitian mengenai pelaporan dan kinerja retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat potensial untuk dilihat perkembangannya.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kesesuaian pelaporan akuntansi untuk retribusi pasar dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ?
2. Bagaimana kinerja retribusi pasar mampu tercapai dari tahun 2009-2012 ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis pelaporan akuntansi retribusi pasar sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan untuk menganalisis kinerja retribusi pasar sesuai dengan target yang ditentukan.

1.4.Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan studi ilmiah untuk mengetahui pelaporan dan kinerja retribusi pasardalam Keuangan Daerah dan secara spesifik pengelolaan PAD Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 2009-2012.
 - b. Sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja retribusi pasar dan pelaporan akuntansi dalam keuangan daerah dan secara spesifik pengelolaan PAD Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 2009 -2012 beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- c. Sebagai bahan studi pustaka di almamater peneliti yakni di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan kajian praksis bagi DISPENDA Kabupaten Kediri untuk mengevaluasi kinerjanya selama kurun waktu 2009 -2012.
- b. Sebagai bahan kajian praksis bagi DISPENDA Kabupaten Kediri untuk merumuskan desain strategi dalam upaya pengelolaan retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Kediri ke depannya.

1.5. Batasan Penelitian

Dalam menganalisis kepatuhan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri ini, penelitian lebih di fokuskan pada sistem pencatatan akuntansi, prosedur penerimaan kas dan penyampaian laporan realisasi anggaran. Peneliti menganalisa dari elemen pencatatan serta kegiatan dokumentasi dan tata usaha keuangan lainnya yang mendukung kepatuhan pelaporan akuntansi berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 .Sedangkan untuk kinerja retribusi pasar mulai dari tahun 2009-2012 untuk perhitungan laju pertumbuhan pasar dari tahun 2010-2012.